



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUH. KHARIS
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
3. NHK : 980235

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.399.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/47 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/6 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.000 m²/104 m² di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 1.052.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m²/224 m² di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 612.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m²/97 m² di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 448.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m²/697 m² di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 1.018.200.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m²/538 m² di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 769.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 11.000.000

1. MOTOR, YAMAHA BJ8 W A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Sub Total

Rp. ----

Rp. 4.411.700.000

III. HUTANG

Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.311.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.